Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Nama :
NPWP :
Alamat :

No.	NPWP Tempat Usaha KPP Lokasi	Alamat	Peredaran Bruto Pedagang Pengecer	PPh Pasal 25 Dibayar
Jumlah				

Tanda Tangan, Nama dan Cap

……

Jika formulir ini tidak mencukupi, dapat dibuat sendiri sesuai dengan bentuk ini

Daftar Jumlah Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013
Per Masa Pajak Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha

Nama :
NPWP :
Alamat :

No.	NPWP Tempat Usaha KPP Lokasi	Alamat	Peredaran Bruto	PPh Final 1% Dibayar
Jumlah				

Tanda Tangan, Nama dan Cap

……

Jika formulir ini tidak mencukupi, dapat dibuat sendiri sesuai dengan bentuk ini

Halaman ke- ……. dari ……. halaman

……, …….. 20….

Perihal:
Pemberitahuan Penggunaan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

……..

di Tempat

Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000 tentang Norma Penghitungan untuk Menghitung Penghasilan Neto, dengan ini kami:

Nama : ……

Alamat : ……

……

NPWP : ……

memberitahukan bahwa untuk Pajak Penghasilan Tahun Pajak ……. akan dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Penghasilan utama yang kami peroleh termasuk dalam Daftar Kode Nomor ……. dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) ……

Demikian disampaikan.

Wajib Pajak

……

Formulir ini disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, terpisah dari pelaporan SPT Tahunan

Formulir ini disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, terpisah dari pelaporan SPT Tahunan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF KAPITAL/CETAK. Isi atau beri tanda x pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat petunjuk)

Jenis Perubahan: ☐ Permohonan Wajib Pajak ☐ Perubahan Data Secara Jabatan

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nomor Pokok Wajib Pajak
2. Nama Wajib Pajak

Gelar Depan Gelar Belakang

B. PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

1. Perubahan Kategori Wajib Pajak orang pribadi
   - ☐ 1. Orang Pribadi
   - ☐ 2. Wanita yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB)
   - ☐ 3. Istri dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH)
   - ☐ 4. Istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah (MT)
   - ☐ 5. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak (WBT)
2. Perubahan Identitas Wajib Pajak

Nama Wajib Pajak

Gelar Depan Gelar Belakang

Tempat /Tanggal lahir (tgl-bln-thn) /

Status Perkawinan ☐ 1 Kawin ☐ 2 Tidak Kawin

Kebangsaan ☐ Indonesia NIK:

☐ Asing Negara Asal

No. Paspor:

Nomor Telepon/Handphone

E-mail

3. Perubahan Sumber Penghasilan Utama

☐ Pekerjaan dalam hubungan kerja
- ☐ 1. PNS ☐ 2. TNI/POLRI
- ☐ 3. Pensiunan ☐ 4. Pegawai Swasta
- ☐ 5. Pegawai BUMN/BUMD ☐ 6. Pegawai Badan Publik
- ☐ 7. Pejabat Negara/Daerah ☐ 8. Pekerja pada pemberi kerja yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak
- ☐ 9. Pegawai Lainnya Uraian .....

KLU (diisi oleh petugas)

☐ Kegiatan Usaha

KLU (diisi oleh petugas)

Merk Dagang/Usaha

Memiliki Karyawan ☐ Ya ☐ Tidak

Metode Pembukuan/Pencatatan ☐ Pembukuan ☐ Pencatatan

☐ Pekerjaan Bebas

KLU (diisi oleh petugas)

Merk Dagang/Usaha

Memiliki Karyawan ☐ Ya ☐ Tidak

Metode Pembukuan/Pencatatan ☐ Pembukuan ☐ Pencatatan

☐ Lainnya

KLU (diisi oleh petugas)

4. Perubahan Alamat ☐ Tempat Tinggal
☐ Domisili KTP
☐ Tempat Usaha

Alamat Baru:
Jalan

Blok

Nomor RT/RW /

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kota/Kabupaten

Kode Pos

Propinsi

Nomor Telepon No. Faksimile

C PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK BADAN

C.1. PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK BADAN (kecuali Bendahara)

1. Perubahan Bentuk Badan
☐ 1. Perseroan Terbatas (PT) ☐ 2. Perseroan Komanditer (CV) ☐ 3. Perseroan lainnya
☐ 4. BUMN/BUMD ☐ 5. Firma (Fa) ☐ 6. Kongsi
☐ 7. Koperasi ☐ 8. Dana Pensiun ☐ 9. Persekutuan dan Perkumpulan
☐ 10.Yayasan ☐ 11. Organisasi massa ☐ 12. Organisasi sosial politik
☐ 13.Organisasi lainnya ☐ 14. Lembaga dan bentuk badan lainnya ☐ 15. Kontrak investasi kolektif
☐ 16. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2. Perubahan Permodalan/Kepemilikan ☐ PMA ☐ PMDN ☐ Pemerintah ☐ Lainnya

3. Perubahan Nama Wajib Pajak

4. Perubahan Alamat Tempat Kedudukan:
Jalan

Blok

Nomor RT/RW /

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kota/Kabupaten

Kode Pos

Propinsi

Telepon/Faksimile dan E-mail :
Nomor Telepon No. Faksimile

E-mail

5. Dokumen Dasar Pendirian dan/atau perubahan terakhir:
Nomor Akte

Tempat/Tanggal Akte (tgl-bln-thn) /

Nama Notaris

Nomor Akte Perubahan

6. Perubahan Tahun Buku sd.

7. Perubahan Jenis Usaha / Kegiatan

(diisi oleh petugas)

8. Perubahan Merk Dagang/Usaha

9. Perubahan Pimpinan/Penanggung Jawab :

Nama

Jabatan

Kebangsaan ☐ Indonesia NIK:

☐ Asing Negara Asal

No. Paspor:

NPWP

Alamat domisili:

Jalan

Blok

Nomor RT/RW /

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kota/Kabupaten

Propinsi

Kode Pos

Nomor Telepon No. Faksimile

Nomor Handphone

E-mail

C.2. PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK BENDAHARA

10. Nama Resmi Jabatan Bendahara

11. Nama Satuan Kerja/Instansi

12. Nomor Surat Penunjukan

13. Alamat Satuan Kerja/Instansi:

Jalan

Blok

Nomor RT/RW /

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kota/Kabupaten

Kode Pos

Propinsi

Nomor Telepon/Faksimile: No. Faksimile

Identitas Pejabat Bendahara:

14. Nama pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara:

NIK/Nomor KTP

NPWP Orang Pribadi pejabat bendahara:

15. Alamat domisili:

Jalan

Blok

Nomor RT/RW /

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kota/Kabupaten

Kode Pos

Propinsi

Nomor Telepon No. Faksimile

Nomor Handphone

E-mail

D. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

Telah diteliti: ☐ Lengkap dan Benar Petugas, ... NIP.....	....., tanggal ..... Pemohon, ...